



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

Judul : E-Voting yang Berisiko Diretas dan Ditinggalkan
Tanggal : Kamis, 05 Februari 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

PENYELENGGARAAN PEMILU

"E-Voting" yang Berisiko Diretas dan Ditinggalkan

Machradin Wahyudi Ritonga

Wacana penerapan pemungutan suara secara elektronik dalam pemilu atau *e-voting*, yang kini me- ngambuka di tengah rencana Undang-Undang Pemilu, bukanlah hal baru. Sejumlah pihak mengidentifikasi ada kerawanan dalam penerapannya dan sejumlah negara maju pun telah mengadopsikannya.

Pengajar hukum tata negara Universitas Indonesia, Titi Anggraini, mengungkapkan, wacana penerapan *e-voting* yang berkeadilan justru revisi UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu perlu ditilik secara proporsional dan hati-hati.

Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan Nomor 147/PUU-VII/2009 memang tidak menutup kemungkinan penerapannya teknologi dalam pemungutan suara. Tetapi, MK menegaskan prinsip penting bahwa penerapannya harus secara bertahap dan terukur. Ini tidak boleh mengorbankan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil," ujarnya, saat dihubungi dari Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Usulan penggunaan *e-voting* disuarakan oleh Partai De- mokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). *E-voting* didorong diterapkan pada pemilihan kepala daerah (pilkada) untuk menekan biaya tinggi penyelenggaraan pilkada langsung. Hal itu menjadi salah satu keputusan Rapat Kerja Nasional PDI-P pada pertengahan Januari lalu.

Komisi II DPR yang tengah menyusun draf revisi UU Pemilu mengkaji penerapan *e-voting*. Menteri Sekretaris Ne- gara Prasetyo Hadi pun menilai *e-voting* layak dikaji sebagai bagian dari upaya memperbaiki sistem kepemiluan.

Manipulasi sistem

Kehati-hatian sebelum menerapkan *e-voting*, lanjut Titi, penting karena sistem pemilihan itu membawa konsekuensi yang kompleks. Karena langsung berarti jalur proses pemilu, yakni pemungutan suara, Titi melihat ada risiko besar yang mengancam, seperti kejahatan siber, manipulasi sistem, krisis kepercayaan publik.

Kekhawatiran itu disandingkan dengan kesenjangan infra- struktur hingga literasi digital di sejumlah wilayah. Selain itu, Titi juga menyayangkan persiapan metode baru tersebut dapat menyelesaikan masalah yang kerap muncul di pemilu, terutama terkait kecurangan dan politik uang.

"Dalam konteks Indonesia yang tingkat literasi digital rendah dan kesenjangan infrastruktur teknologinya masih tinggi, penerapan *e-voting* secara luas justru bisa kontra- produktif jika dilakukan terburu-buru," kata Titi.

Kekhawatiran serupa juga diutarakan dosen Ilmu Peme- rintahan Universitas Brawijaya, George Towar Ikhlaq Tawakkal, di rapat dengar pendapat umum untuk menyerap masukan sejumlah pakar terkait revisi UU Pemilu di Komisi II DPR, Jakarta, Selasa (3/2). Ia menilai Indonesia belum siap hadapi ancaman serangan siber dari penerapan metode ini.

"Saya bukan lawan siber karena rawan untuk *hack back* (peretasan). Keamanan siber itu, ngerti, ya penjahat-penjahat siber itu. Entah dari lawan politik atau memang orang iseng- klan, enggak tahu," tuturnya.

Ditinggalkan

George juga mengingatkan bahwa *e-voting* ditolak sebagi- lah negara, termasuk di antaranya negara besar. Dia juga menyayangkan hasil penelitian Andrea Riera and Paul Brown yang menunjukkan ketidakpercayaan masyarakat di nega- ra-negara Amerika Latin terhadap hasil *e-voting*.

"Negara-negara besar seperti Jerman dan Belanda, per- nah menggunakan *e-voting*. Tetapi, kemudian dibatalkan, sekarang enggak mau lagi. Rawan. Berhenti mereka, karena itu, masalah kepercayaannya diragukan terus," ujarnya.

Jika melihat konteks wacana penerapan teknologi digital untuk mengurangi potensi manipulasi, Titi lebih condong menyarankan penggunaan rekapitulasi suara secara elek- tronik atau *e-rekap*.

Metode ini, lanjutnya, mampu menekan biaya pemilu dari sisi rekapitulasi suara manual yang lambat, berbiaya tinggi, hingga manipulasi di tiap tahap rekapitulasi berjenjang.

Titi juga mengingatkan, Indonesia sudah menggunakan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dalam rangkaian Pemilu 2024 di samping rekapitulasi suara manual. Karena itu, dia menyarankan agar negara memperbaiki dan me- nyempurnakan sistem rekapitulasi digital tersebut.

Langkah yang lebih realistis saat ini adalah memperkuat digitalisasi pada tahap rekapitulasi. Serius membenahi dan menyempurnakan Sirekap sebagai pengganti mekanisme manual yang rentan lambat, berbiaya tinggi, dan rawan manipulasi di titik-titik rekapitulasi berjenjang," tuturnya.

Namun, yang lebih penting kata Titi, adalah kapasitas penyelenggara pemilu. Transformasi digital ini memban- tun. Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang kompeten secara administratif dan juga kuat secara teknis, kepemiluan, hu- kum, dan manajemen risiko.

"Tanpa penyelenggara yang profesional dan kredibel, tek- nologi justru menjadi sumber persoalan baru, bukan solusi demokrasi. Teknologi di tangan penyelenggara yang partisan dan oportunistik hanya akan jadi alat kecurangan baru yang efektif untuk memanipulasi suara," tegasnya.

Bagaimanapun demokrasi tak hanya membutuhkan cepat dan murah, tetapi juga dipercaya. Adis-Adis menggunakan cara yang berisiko, memperkuat sistem yang sudah ada seperti Sirekap, tentunya lebih realistis.